

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Isu nuklir di kawasan Semenanjung Korea merupakan konflik lanjutan setelah adanya gencatan senjata sejak tahun 1953, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan kerap mengalami pasang surut, sehingga selalu menimbulkan kekhawatiran ketika kedua negara Korea ini berinteraksi dalam hal internal maupun eksternal. Sebagaimana ketahui bahwa kedua negara tersebut tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian secara resmi sehingga masih dikatakan dalam kondisi perang dingin. (BBC, 2015). Rudal nuklir Korea Utara ini telah menimbulkan ketegangan di kawasan, karena dianggap akan mempengaruhi kestabilan keamanan yang sangat buruk, di mana tak hanya satu dua wilayah saja bahkan dunia pun akan terkena dampak dan reaksi nuklirnya (Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, 2010, hal. 6).

Konflik nuklir yang terjadi di kawasan tersebut, bukan hanya dikarenakan oleh konflik saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara saja, tetapi telah dipengaruhi oleh kondisi sistem internasional di kawasan Semenanjung Korea itu sendiri. Semenanjung Korea berbatasan dengan negara-negara maju seperti, Rusia, China, Jepang, Asia Tenggara, Timur Tengah dan sebagainya, di mana memiliki peran penting untuk mencapai kepentingannya. Secara tidak langsung akan membentuk suatu tatanan regional yang memiliki pengaruh dalam

menentukan dinamika kekuasaan, ekonomi, politik dan keamanan terhadap kawasan (Kireeva, 2016, p. 113).

Selama 65 tahun lebih Semenanjung Korea mengalami konflik dan konfrontasi di DMZ. Bersamaan dengan itu, telah dilakukannya dialog, kerja sama dan pertukaran yang terus terjalin antar Korea. Namun, tak membuat Korea Utara meninggalkan program nuklirnya, bahkan dengan tindakan uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara yang terus berlanjut tersebut menjadi ancaman nyata bagi kawasan Semenanjung Korea dan sekitarnya (BBC, 2015). Untuk menanggulangi isu nuklir di kawasan tersebut, Korea Selatan melalui strategi kebijakan luar negerinya berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan Korea Utara.

Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara mulai membaik ketika Kim Dae Jung terpilih sebagai Presiden Korea Selatan untuk periode 1998-2003, yang mana mengeluarkan strategi *Sunshine Policy* untuk menghadapi Korea Utara. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan Korea Selatan dan Korea Utara melalui dialog secara damai dan menciptakan reunifikasi Korea melalui perdamaian, kerja sama di berbagai bidang, bantuan ekonomi dan kemanusiaan tanpa syarat ke Korea Utara (Nack, 1999, p. 9). Setelah melakukan pertemuan dan dialog di antara kedua pimpinan Korea tersebut, telah disetujuinya beberapa kerja sama dan diplomasi yang akan dilaksanakan bersama seperti membangun infrastruktur untuk menghubungkan kedua negara dan dilakukannya pembangunan industri Kaesong (Sik, 2002, p. 105).

Periode tahun 2003-2008, Korea Selatan mengeluarkan *Policy for Peace and Prosperity* yang merupakan strategi pendekatan melalui dialog yang digunakan Presiden Roh Moo Hyun dalam menghadapi Korea Utara. Presiden Roh Moo Hyun menyatakan bahwa tidak hanya ingin mempertahankan kebijakan terdahulunya, namun juga memperluas ruang lingkup dan isi dari *Sunshine Policy* dan membangun suatu struktur perdamaian dan kesejahteraan di Semenanjung Korea. Dalam pengimplementasian kebijakan Roh Moo Hyun, mempunyai hambatan yang membuat reunifikasi Semenanjung Korea menjadi terhalang yaitu, terjadinya krisis nuklir. Sehingga membuat sikap Korea Utara berubah menjadi lebih agresif dan mempengaruhi peimplementasian dari *The Policy of Peace and Prosperity*. Pada kebijakan ini, telah mencapai beberapa kemajuan yang signifikan dalam perekonomian antar Korea, khususnya dalam kerja sama industri Kaesong yang dimana salah satu pendapatan terbesar Korea Utara berasal dari kerja sama tersebut (Nack, 2006, pp. 38-43).

Setelah masa periode Roh Moo Hyun, Korea Selatan di pimpin oleh Lee Myung Bak untuk periode 2008-2013. Kebijakan Lee Myung Bak sangat berbeda dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, di mana mulai bersikap tegas dan pragmatis terhadap Korea Utara agar mau untuk menghentikan pengembangan program nuklirnya. Melalui *The Policy Of Mutual Benefit and Common Prosperity*, kebijakan ini mendapatkan kecaman keras dari Korea Utara dan hubungan kedua negara semakin memburuk (Chul, 2008, pp. 39-40). Peristiwa tenggelamnya kapal Angkatan Laut Korea Selatan Cheonan dan di ikuti dengan peristiwa penembakan oleh militer Korea Utara di Pulau Yeonpyeong pada tahun 2010, membuat ketegangan semakin memanas di Semenanjung Korea (Macfie, 2010).

Setelah berakhirnya masa periode kepemimpinan Lee Myung Bak, Korea Selatan di gantikan oleh Park Geun Hye sebagai presiden perempuan pertama yang menjadi pemimpin di Korea Selatan pada periode 2013-2017. Kebijakan luar negeri yang di keluarkan Park Geun Hye ialah *Trustpolitik Policy* (CNN, 2013). Sesuai dengan isi pidato pelantikannya tersebut, Park Geun Hye ingin menciptakan kehidupan yang bahagia di kawasan Semenanjung Korea dan seluruh masyarakat global. *Trustpolitik Policy* merupakan salah satu upaya Korea Selatan dalam membangun hubungan kepercayaan terhadap Korea Utara untuk menurunkan tensi konflik yang terjadi (Yonhap, 2013). Park Geun Hye mengatakan bahwa arah kebijakannya tersebut untuk menghadapi negara tetangganya itu dengan cara *softpower*, melalui membangun rasa saling percaya antar Korea sebagai pondasi untuk menciptakan perdamaian sejati dan unifikasi bagi kedua negara (World, 2013).

Kebijakan ini difokuskan untuk membangun kepercayaan terhadap Korea Utara melalui pemberian bantuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Korea Utara (Ouellette, 2013, p. 2). Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan dengan mudah, di mana ketika awal *Trustpolitik Policy* tersebut Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ketiga. Uji coba nuklir tersebut merupakan pertama bagi Korea Utara sejak kepemimpinan Kim Jong Un yang mengambil alih kekuasaan ayahnya, Kim Jong Il (CBS, 2013). Hingga tahun 2017, Korea Utara terus melakukan uji coba nuklirnya, di mana ledakan tersebut lebih kuat di bandingkan dengan ledakan-ledangan sebelumnya. Bahkan menunjukkan bahwa uji coba nuklir tersebut cukup kuat untuk menenggelamkan area seluas 85 hektar di puncak gunung kompleks terowongan Punggye-ri yang merupakan lokasi uji

coba nuklirnya saat itu (Lee, 2017). Tindakan uji coba nuklir Korea Utara tersebut mengancam keamanan dan membuat ketidakstabilan di Semenanjung Korea (Michaels, 2017).

Ketegangan di antara kedua negara tersebut pun semakin memanas dan membuat operasional industri di Kaesong ditutup sementara (Putz, 2016). Sebagaimana diketahui bahwa kerja sama industri Kaesong tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Korea Utara (Nack, 2006, p. 41). Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga memberikan kebijakan berupa sanksi melalui resolusi-resolusi terkait dengan peluncuran rudal nuklir dan melakukan embargo terhadap Korea Utara karena dianggap akan menimbulkan potensi konflik dalam kehidupan masyarakat internasional (BBC, 2006).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Mengapa Korea Selatan menggunakan *Trustpolitik Policy* dalam upaya menghadapi konflik nuklir Korea Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri Korea Selatan "*Trustpolitik Policy*" dalam upaya menormalisasikan hubungan antar kedua negara Korea
2. Mengetahui dinamika hubungan kedua negara tersebut
3. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan Korea Selatan dapat mempengaruhi respon dari Koea Utara

#### **1.4 Signifikansi**

Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak yang belum membahas secara rinci mengapa Korea Selatan mengeluarkan kebijakan *Trustpolitik* dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Korea Utara dengan menggunakan teori atau konsep yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini. Kebijakan ini juga perlu dikaji lebih dalam karena, Korea Selatan dan Korea Utara masih menimbulkan masalah-masalah yang membuat hubungan di antara kedua negara Korea tersebut semakin merenggang. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjelaskan titik balik pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Korea Selatan untuk menghadapi ancaman Korea Utara yang terjadi saat ini.

#### **1.5 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam lingkup kajian hubungan internasional dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan. Penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri pada masa kepemimpinan Park Geun Hye melalui "*Trustpolitik Policy*" di periode kepemimpinan 2013-2017 untuk menghadapi ancaman program rudal nuklir Korea Utara. Selain itu, penelitian ini akan memaparkan terkait tindakan Korea Utara yang kerap melakukan peluncuran rudal nuklirnya pada tahun 2013-2017, yang mana merupakan awal *Trustpolitik Policy*.

## 1.6 Kajian Pustaka

Dalam penelitian terkait isu nuklir di kawasan Semenanjung Korea ini, sebenarnya sudah ada sejumlah peneliti yang ikut menganalisis permasalahan ini baik dalam buku, jurnal maupun artikel lainnya. Penelitian yang penulis anggap cukup relevan untuk penelitian ini akan penulis jadikan bahan sebagai tinjauan pustaka. Seperti yang ada di dalam buku yang disusun oleh the Federal Research Division of the Library of Congress under the Country Studies yang berjudul “*South Korea: A Country Study*”, 1990, Washington. Pada bab IV buku ini membahas tentang *Foreign Policy: Relations with North Korea* yang mana memaparkan tentang hubungan yang terjalin dengan Korea Utara.

Dalam bab IV buku ini, menjelaskan tentang *Nordpolitik* yang dikeluarkan dibawah kepemimpinan Roh Tae Woo, yang mana dijadikan alat Korea Selatan untuk membangun hubungan dengan sekutu lama Korea Utara seperti, Tiongkok dan Rusia sebagai mediator untuk memperbaiki hubungan mereka. Menurut Korea Utara, *Nordpolitik* ini hanya sebagian dari strateginya untuk mempengaruhi sekutunya untuk berpihak ke Korea Selatan sehingga akan menggeser posisi Korea Utara. Saat ini, Korea Selatan dan Korea Utara sudah meningkatkan hubungan mereka satu sama lain secara bertahap dan keamanan di sekitar zona demiliterisasi. Para pemimpin bisnis Korea Selatan telah menyadari bahwa adanya potensi proses perdamaian dengan Korea Utara melalui ekonomi, yang mana secara perlahan membentuk pertumbuhan industri yang menjanjikan sehingga akan memperbaiki hubungan di Semenanjung Korea (Shaw, 1990, pp. 261-263). Pada buku ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan Korea Selatan dan Korea Utara menggunakan *Nordpolitik* sebagai upaya untuk mengurangi adanya

ketegangan di Semenanjung Korea dan membangun kerja sama bersama. Melalui buku ini akan penulis gunakan untuk mengetahui upaya kebijakan Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara.

Selain melakukan upaya kebijakan luar negeri dengan Korea Utara, Korea Selatan juga berupaya dari dalam domestiknya dengan meningkatkan pertahanan militer negaranya untuk menghadapi nuklir Korea Utara seperti dalam buku yang ditulis oleh Yang Seung Yoon dan Mohtar Mas'eod yang berjudul "*Politik Luar Negeri Korea Selatan: Penyesuaian Diri terhadap Masyarakat Internasional*", 2004, Gadjah Mada University Press. Pada bab III buku ini membahas tentang perubahan kebijakan keamanan Korea Selatan dengan mengerahkan peningkatan kekuatan militernya untuk meminimalisir terjadinya perang di Semenanjung Korea serta ikut berpartisipasi aktif dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di wilayah Asia Timur dan Pasifik Barat.

Perubahan kebijakan ini di maksudkan untuk meningkatkan kemampuan militer dan membentuk kredibilitas melalui kerja sama antara militer Korea Selatan dengan militer Amerika Serikat untuk mengatasi ancaman dari luar. Semenanjung Korea di akui memiliki kawasan yang strategis, yang mana secara geografis di kelilingi oleh negara-negara besar dan kuat seperti, China, Jepang dan Rusia bahkan memiliki sekutu dan aliansi yang cukup kuat di dunia sehingga Semenanjung Korea cenderung dijadikan sasaran empuk untuk menyebarluaskan pengaruh dan kepentingan negara-negara besar tersebut (Yang Seung Yoon and Mohtar Mas'eod, 2004). Pada buku ini dapat membuka pandangan penulis untuk menganalisis bagaimana Korea Selatan melakukan kerja sama dengan negara lain untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara tersebut.

Pada tahun 1998, Kim Dae Jung mengeluarkan *Sunshine Policy* terhadap Korea Utara untuk meningkatkan hubungan antar korea melalui rekonsiliasi, bantuan ekonomi dan kemanusiaan, serta kerja sama tanpa menawarkan syarat apapun. Bersamaan dengan itu, pada tahun 2000 Kim Dae-Jung dan Kim Jong-Il memulai proses KTT Inter-Korea yang diselenggarakan langsung di Pyongyang (Yun Byung-se , 2013). Berkaitan dalam jurnal *East Asian Review* yang ditulis oleh Moon Chung In yang berjudul “*The Sunshine Policy and The Korean Summit: Assessment and Prospects*”, Winter 2002, Vol.12, No.4, The Institute for East Asian Studies (the IEAS). Jurnal ini membahas tentang dinamika *Sunshine Policy* serta konsekuensinya dan menganalisa kegiatan KTT Inter-Korea yang telah di sepakati. Moon Chung In menilai dan mengamati implemetasi dari kebijakan Kim Dae Jung melalui *Sunshine Policy* dan KTT Inter-Korea tersebut.

Menurut Moon Chung In apa yang dilakukan dan diselenggarakan pada tahun 2000 lalu dalam KTT Inter-Korea telah membawa suatu keberhasilan besar untuk proses reunifikasi Semenanjung Korea, yang mana adanya keberanian besar dari pimpinan Korea Selatan berkunjung ke Korea Utara secara langsung untuk berdialog dan bekerja sama mewujudkan *Sunshine Policy* agar dapat membuka jalan untuk *peaceful co-existence* dan unifikasi di Semenanjung Korea (Chung-In, 2000, pp. 3-36). Jurnal ini berpendapat bahwa *Sunshine Policy* terhadap Korea Utara dinilai berhasil, karena pada *Sunshine Policy* ini mampu membuka jalur dialog sehingga menciptakan adanya kerja sama di Inter-Korea sehingga permusuhan yang cukup lama di antara kedua negara tersebut dapat di kesampingkan dengan melakukan berbagai kerja sama melalui *Sunshine Policy*.

Dengan demikian penelitian ini akan membantu penulis dalam membedakan keefektifan strategi *Sunshine Policy* dan *Trustpolitik Policy*.

Berbeda dengan Korea Utara, yang mana telah menjadikan nuklir sebagai alat diplomasinya dengan negara lain seperti dalam jurnal yang ditulis Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri mengenai “*Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional*”, 2010, Vol.7, No.2, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Jurnal tersebut menjelaskan terkait bagaimana Korea Utara berhasil menjadikan nuklir sebagai instrumen diplomasi terhadap dunia internasional demi meraih kepentingan nasionalnya. Korea Utara telah berhasil menempatkan nuklir sebagai kepentingan sekaligus permasalahan bagi sistem politik luar negeri negaranya sehingga membuat senjata nuklir ini diakui sebagai senjata yang sangat berbahaya dan memiliki kekuatan dalam politik.

Korea Utara mempertahankan program nuklirnya untuk melindungi keamanan domestik, khususnya dari ancaman agresi militer Amerika Serikat yang di anggapnya sebagai musuh yang ingin menyingkirkan rezimnya. Menurut Korea Utara, program nuklirnya merupakan sarana atau instrumen diplomasi yang efektif untuk menghadapi Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya di meja perundingan dan diplomasi. Selain sebagai instrumen diplomasi untuk menjaga eksistensi keamanan nasionalnya, program nuklir ini juga menghasilkan keuntungan ekonomi, bantuan pangan, pendanaan dan lain-lain sehingga satu-persatu kebutuhan atau kepentingan nasionalnya terpenuhi (Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, 2010). Penelitian ini dapat mendukung penulis dalam menganalisis faktor-faktor Korea Utara terus melakukan uji coba nuklir.

Untuk menyelesaikan konflik nuklir di kawasan Semenanjung Korea ini, telah dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi ketegangan yang terjadi di antara kedua negara tersebut, seperti dalam buku “*Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan*”, yang ditulis Sukawarsini Djelantik, 2015, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Pada bab X di buku ini menjelaskan bahwa adanya beberapa pihak yang ikut berkontribusi aktif dalam ketidakamanan dunia yang di sebabkan oleh nuklir Korea Utara tersebut. Bab ini memaparkan terkait upaya dari beberapa pihak tersebut dalam melakukan diplomasi untuk denuklirisasi Semenanjung Korea, yang mana menginginkan adanya solusi damai untuk kedua negara. Setelah mundurnya Korea Utara dari perjanjian Nonproliferasi Nuklir tahun 2003, mulai diadakannya perundingan enam negara (*Six Party Talks*), di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, dan Korea Utara di mana sebagai pertemuan membahas masalah program nuklir Korea Utara namun tidak ada pencapaian kesepakatan damai.

Pada tahun 2009 *Six Party Talks* tidak di adakan, melainkan Amerika Serikat dan negara anggota *Six Party Talks* lainnya melakukan pembicaraan terpisah dengan Korea Utara sejak saat itu. Awalnya Korea Utara mengaku bahwa tenaga nuklir yang di miliknya hanya untuk mengembangkan produksi bahan bakar di negaranya. Namun tahun 2006 hingga 2017 Korea Utara menggunakan tenaga nuklir tersebut sebagai alat berdiplomasinya dengan negara-negara kuat agar dapat mempertahankan rezim dan posisi *buffer zone* nya di Asia Timur. Bab X buku ini menyarankan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan baru terhadap Korea Utara, yaitu dengan membangun suatu hubungan yang saling percaya, karena rasa kepercayaan lebih berpotensi untuk membuka jalur diplomasi dan

negosiasi yang mengarah ke proses perdamaian (Hyung, 2015, pp. 201-221). Buku ini dapat mendukung penelitian penulis, di mana memberitahukan penulis bahwa adanya peranan multilateral yang ikut berperan aktif dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.

Tindakan uji coba nuklir Korea Utara ini menciptakan kondisi keamanan internasional terancam seperti dalam buku yang berjudul, “*Regionalism and Globalization in East Asia: Politics, Security, and Economic Development*”, yang ditulis oleh Mark Beeson, 2014, Palgrave Macmillan, New York. Pada bab 5 buku ini membahas tentang keamanan internasional, yang mana menjadi isu penting dalam hubungan eksternal dan internal kawasan Asia Timur. Ada beberapa interpretasi yang signifikan dan berpengaruh terhadap perilaku negara untuk keamanan internasional itu sendiri. Keamanan internasional menunjukkan adanya tindakan negara yang tidak dapat di prediksi dari struktur sistem internasional, di mana membuat struktur sistem internasional itu mengalami perubahan yang signifikan.

Pada buku ini memberikan penjelasan mengenai adanya isu-isu keamanan yang baru di kawasan Asia Timur, yang mana mencuri perhatian dunia internasional seperti Taiwan, Korea Utara, Laut China Selatan dan lainnya yang akan memberikan ancaman konflik jangka panjang untuk keamanan Asia Timur. Pada bab ini menjelaskan tentang adanya perbedaan di antara negara kawasan menjadi penentu penting dalam membuat pengaturan keamanan nasional dan hubungan eksternal antar negara Asia Timur (Beeson, 2014). Buku ini dapat penulis gunakan sebagai referensi pendukung dalam mengetahui perkembangan

kondisi yang terjadi di kawasan Asia Timur yang mana akan menjadi tolak ukur dalam menganalisis penelitian ini.

Dari beberapa kajian pustaka yang telah di tuliskan diatas, sebagian kecil merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara, seperti implementasi kebijakan luar negeri *Nordpolitik*, *Sunshine Policy*, kebijakan pertahanan keamanan domestik Korea Selatan, instrumen nuklir yang dijadikan sebagai alat diplomasi Korea Utara dan kondisi hubungan negara-negara di Asia Timur dan upaya bantuan dari negara-negara lain untuk menyelesaikan konflik nuklir di Semenanjung Korea tersebut. Sebagaimana di ketahui bahwa banyaknya hambatan dan masalah yang muncul diantara kedua negara Korea ketika itu *Trustpolitik Policy* di jalankan, sehingga membuat hubungan Korea Selatan dan Korea Utara semakin tegang. Dengan begitu, penulis ingin menganalisis bagaimana upaya Korea Selatan dalam *Trustpolitik Policy* untuk menghadapi ancaman program nuklir Korea Utara tersebut.

## 1.7 Landasan Konseptual

### *Rational Choice Theory*

Dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri paling sering menggunakan *Rational Decision-Making Model* atau sering dikenal dengan *Rational Choice Theory*, yang mana digunakan sebagai alat menjelaskan pilihan dan melihat perilaku para pembuat keputusan. *Rational Choice Theory* muncul bersamaan ketika pandangan realis sedang menonjol dalam hubungan internasional. Hal ini kemudian digunakan sebagai pilihan yang paling rasional dalam menentukan perilaku dan tindakan negara untuk menghitung kekurangan dan keuntungan dari tindakan tersebut, sehingga memilih salah satu pilihan yang paling menguntungkan. Menurut Graham T. Allison (Allison, 1969, p. 690), *Rational Choice Theory* terbagi menjadi tiga model dalam proses pengambilan keputusannya yaitu;

#### 1. *Rational Actor Model*

*Rational Actor Model* merupakan model proses pembentukan kebijakan luar negeri yang paling sering digunakan, di mana berada dalam lingkungan internasional yang menentukan aksi negara sebagai aktor dan membuat suatu pilihan yang rasional (Jensen, 1982, p. 5). Menurut Graham T. Allison (Graham, 1971, p. 33), keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip utama dalam menyusun kebijakan luar negeri. *Rational Actor Model* melakukan pilihan terhadap kebijakan luar negeri sebagai produk ideal. Mengingat pengambil keputusan yang rasional mengambil mempertimbangkan tujuan kebijakan luar negeri dan menentukan yang mana untuk mengambil pilihan yang paling prioritas

di antara pilihan yang lain. Hal ini juga merupakan sebagai upaya untuk menjelaskan peristiwa internasional dengan berlandaskan tujuan dan perhitungan negara atau pemerintah (Allison, 1971, p. 10).

Sebagai aktor rasional, terutama pemerintah mempunyai nilai (perhitungan), yang mana aktor tersebut mengumpulkan pilihan, informasi, resiko berat, yang kemudian memilih dan membuat rencana dari setiap pilihan sebagai suatu cara untuk memprediksi apa yang akan terjadi jika mengambil pilihan tersebut. Dengan asumsi ini, pembuat keputusan menghitung nilai yang diharapkan dari setiap pilihan, membandingkan semua pilihan, dan memilih pilihan yang paling rasional dan menguntungkan (Allison, 1971, p. 29). Hal ini merupakan sebagai penjelasan satu tujuan yang memungkinkan interpretasi perilaku sebuah negara untuk memilih pilihan yang memaksimal nilai tersebut (Allison, 1971, p. 11). Adapun beberapa indikator dalam mempengaruhi *Rational Actor Model* ialah:

1. *Goals and Objective*
2. *Alternatives*
3. *Consequences*
4. *Choice*

*Pertama Goals and Objective*, mewakili adanya nilai atau utilitas dari sebuah keputusan yang di ambil, yang mana di harapkan setiap aktor dapat menentukan urutan preferensi setiap kemungkinan konsekuensi yang mungkin terjadi dari tindakan tersebut, di mana tiap konsekuensi mengandung sejumlah efek samping dari yang dihasilkan. Kedua *Alternatives*, hal ini mengharuskan

setiap aktor rasional harus memilih salah satu di antara alternatif sebelum aktor tersebut terjebak dalam situasi tertentu. Dalam pengambilan keputusan, alternatif ini direpresentasikan sebagai pohon keputusan yang mana dari tindakan-tindakan alternatif tersebut mencakup tindakan sederhana namun spesifikasi suatu tindakan tersebut harus cukup tepat untuk membedakannya dari alternatif lain sehingga meminimalisir kerugian yang didapatkan. Ketiga, *Consequence*, konsekuensi merupakan hasil yang akan terjadi untuk setiap alternatif yang telah dipilih. Keempat *Choice*, yang mana merupakan pilihan-pilihan dalam alternative yang konsekuensinya dapat menduduki peringkat tertinggi dalam mengambil keputusan. Dari berbagai konsep diatas tersebut telah mencakup ekonomi, keputusan, teori permainan, serta gagasan yang terstruktur yang mendasari asumsi manusia sehari-hari dari tujuan manusia baik dalam perilaku individu dan di internasional dalam kebijakan luar negeri. Hal tersebut bertujuan untuk memilih pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dengan berbagai hambatan yang terjadi (Allison, 1971, p. 30).

Dalam konteks negara, para pembuat keputusan akan diminta untuk berhati-hati memberikan keputusan dengan mencari tahu apa yang harus diharapkan dan dibutuhkan. Dalam hal ini tidak hanya melibatkan keuntungan dan kerugian, tetapi juga memperkirakan kemungkinan dari berbagai hasil yang akan didapatkan. Jika aktor gagal atau tidak mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka hal tersebut merupakan kesalahan dalam pengumpulan data informasi, perhitungan yang salah atau pilihan rasional tersebut yang salah. Model ini, berasumsi setiap aktor tidak bisa mempertimbangkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Ketika sebuah konsekuensi buruk tertentu muncul, yang dapat

dilakukan adalah memodifikasinya untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi itu berulang akan tetapi dengan tingkat yang berbeda.

Model ini banyak dikenal sebagai model strategi atau model aksi-reaksi, yang mana biasa digunakan untuk menerapkan tiap respon sebagai perhitungan rasional untuk menghadapi tindakan yang dilakukan oleh aktor lain. Aktor rasional dalam pengambilan keputusan berkaitan juga dengan lingkungannya, di mana lingkungan tersebut meliputi informasi yang berkaitan dengan aktor lain. Namun, aktor lain mengetahui tindakan tindakan aktor tersebut. Situasi tersebut dapat mempersulit aktor rasional untuk memprediksi hasil dan reaksi dari tindakan yang telah dipilih. Hal ini yang menjadikan aktor rasional menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusannya.

## ***2. The Organization Process Models (OPM)***

Graham T Allison (Allison, 1971, p. 67) menjelaskan bahwa model ini seperti, sebuah kolongmerat dan organisasi semi-feodal yang bekerja sama dengan pemerintah agar dapat bergerak sendiri sebagai pengambil keputusan, yang mana sebagai tindakan yang dipilih oleh satu kesatuan, pembuat keputusan rasional, kendali pusat dan memaksimalkan nilai yang mempunyai kedudukan secara formal. Model ini menjelaskan bahwa terdapat tindakan pemerintah sebagai output organisasi yang dikoordinasikan secara parsial oleh sekelompok pemimpin yang bersatu sebagai dasar perilaku pemerintah untuk membuat pilihan dari pembuat keputusan kesatuan. Dengan demikian, perilaku pemerintah dalam menangani masalah penting telah di pengaruhi oleh pendapat *output* dan *input* dari beberapa organisasi.

Model ini menganggap bahwa tujuan dan sasaran telah dibentuk secara baik, membatasi pilihan berdasarkan standar operasional prosedur, membuka jalan pembuatan kebijakan yang dipengaruhi oleh organisasi-organisasi multilateral atau lembaga dalam negara, setiap organisasi memiliki masing-masing fungsi dan misi. Model ini telah ditentukan dengan pertimbangan dalam mencapai tujuan organisasi yang bekerja sama tersebut seperti, anggaran (dana keuangan), standar operasional prosedur yang meningkatkan efisiensi dan kinerja. Dengan demikian, pembuat keputusan dapat menggunakan batasan untuk mempersempit beberapa pilihan alternatif yang menjanjikan dan hasil yang baik. Akibat dari perilaku-perilaku organisasi tersebut menimbulkan masalah tertentu dalam pemerintahan seperti, tindakan pemerintah yang harus berdasarkan oleh tujuan dan sasaran dalam organisasi di dalamnya. Hal tersebut merupakan tindakan pemerintah sebagai output dari organisasi yang sangat berbeda dari Model I (Allison, 1971, p. 68).

### ***3. The Governmental (Bureaucratic) Politics Model***

Graham T Allison (Allison, 1971, p. 144) juga menjelaskan tentang perilaku pemerintah yang bukan sebagai output organisasi melainkan hasil dari permainan tawar-menawar. Hasil dari proses tawar-menawar politik di antara pemain kunci, tawar-menawar dan kompromi hasil dalam kepuasan tidak mengoptimalkan pengambilan keputusan yang mana pemilihan berdasarkan dukungan dari birokrasi yang sukses melobi pemimpin, ambisi pribadi menjadi pertimbangan birokrasi ketika membuat keputusan, permusuhan dan persahabatan terjadi antara birokrasi, serta pendapat pribadi tentang isu-isu yang terjadi, dapat menyimpang sesuai kebutuhan kebijakan publik yang seharusnya diambil.

Berbeda dengan model I, model politik pemerintah (birokrasi) ini tidak melihat aktor kesatuan melainkan dari banyak aktor sebagai yang menangani tidak hanya fokus satu isu masalah tetapi pada banyak masalah intra-nasional.

Model ini berdasarkan dengan aktor individu yang merupakan kunci pengambilan keputusan berdasarkan pengaruh birokrasi, di mana aktor tersebut memiliki pengaruh besar dalam menentukan tindakan birokrasinya seperti, perbedaan birokrasi, berbeda saran yang diajukan dan hubungan komunikasi antar kekuasaan informal dan formal dalam negara. Keuntungan dari model ini adalah, model menambahkan gambaran penting yang rinci tentang politik dalam negeri, membantu menjelaskan peran birokrasi dalam pemerintah, membantu menjelaskan mengapa tiap birokrasi bekerja sesuai perannya, namun terjadi pertentangan dengan kepentingan pemerintah pada umumnya, membantu menjelaskan mengapa kebijakan terkadang muncul irasional berdasarkan perspektif kesatuan pemerintah (eksekutif), tetapi kelemahannya yaitu, sulit untuk mempelajari dan menganalisis dan terlalu banyak variabel (Allison, 1971, p. 145).

Dari ketiga model tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam model I menggambarkan alasan mengapa memilih pilihan rasional tersebut untuk membuat keputusan. Model II menggambarkan terkait output dari organisasi yang telah dipilih sebagai pilihan rasional untuk mengambil keputusan. Model III menggambarkan mengapa banyak para aktor ikut berpartisipasi dalam menangani berbagai masalah dan membuat pilihan rasional. Dari ketiga model tersebut juga dapat menghasilkan adanya pemikiran mengenai *cost-benefit*, di mana memahami pilihan-pilihan yang memaksimalkan nilai yang akan di dapatkannya sebelum keputusan tersebut bersifat keputusan akhir (Allison, 1971, p. 251).

Dari berbagai model dari *Rational Choice Theory* ini digunakan untuk mengetahui sikap dari para pembuat keputusan dalam memutuskan kebijakan yang akan dikeluarkan. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan menggunakan model dari *Rational Actor Model* sebab melalui model ini penulis melihat bahwa negara sebagai aktor utama serta aktor rasional dalam pembuatan keputusan kebijakan luar negeri dan mampu memberikan penjelasan mengenai pilihan tersebut. Melalui model ini pula menghasilkan analisis dari pilihan yang telah dibuat oleh negara dengan mempertimbangkan *cost* dan *benefit* untuk mencapai kepentingannya.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian tentang *Trustpolitik Policy* Park Geun Hye dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Norman Denzin dan Yvonna Lincoln, metode penelitian kualitatif adalah suatu bidang studi ilmu sosial yang mencakup berbagai metode mulai dari wawancara, observasi, analisis wacana, historis, studi literature, data non-numerik dan data bersifat abstrak. Penelitian kualitatif mengkaji untuk memahami proses dan fenomena melalui makna para aktor dan partisipan dalam perspektif mereka. Metode ini dapat membantu penulis untuk memahami permasalahan dan menfokuskan pada makna dan proses dalam penelitian ini secara detail dan sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang efisien dan koheren. Dengan demikian, penulis akan mendapatkan pemahaman mendalam untuk memberikan penjelasan dan argumen terhadap permasalahan yang diambil dalam penelitian ini (Bakry, 2016).

### **1.8.2 Subjek Penelitian**

Konflik nuklir yang terjadi di kawasan Semenanjung Korea tak hanya mengganggu stabilitas keamanan kawasan Asia Timur tetapi juga keamanan seluruh masyarakat internasional. Mengetahui bagaimana Korea Selatan berupaya dalam menghentikan program nuklir Korea Utara melalui *Trustpolitik Policy*

### **1.8.3 Alat Pengumpul Data**

Dalam metode penelitian kualitatif ini akan mengumpulkan data melalui data skunder yang mana diperoleh dengan mencari sumber-sumber informasi yang mendukung penelitian seperti, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis, jurnal, penelitian berbasis internet, *website*, *report*, *document-based research*, *library research* dan data pendukung lainnya yang mungkin memiliki keterkaitan yang sama atau mempunyai hubungan yang sama dengan penelitian penulis ini. Dalam mengumpulkan data penelitian ini penting untuk melakukan teknik triangulasi yang mana bertujuan untuk mereferensi ulang temuan-temuan sumber informasi penelitian kita. Teknik ini sebagai antisipasi adanya informasi yang salah, karena kita ketahui bahwa sering kali ada partisipan yang sengaja memberikan jawaban atau pernyataan yang menyesatkan pikiran kita (Bakry, 2016, p. 66).

### **1.8.4 Proses Penelitian**

Proses penelitian yang akan di lakukan oleh penulis adalah dengan cara analisa data. Peneliti akan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah di dapat baik jurnal, buku maupun media cetak serta internet yang bersifat kredibilitas yang terpercaya. Proses penelitian akan di lakukan secara sistematis yaitu di mulai dengan mengelola data, meneliti dan menganalisis sumber yang telah terkumpul sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis teliti. Mengingat bahwa metode yang di pakai oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif maka kajian yang di dapat hanya bersumber dari literatur atau kajian pustaka yang dapat mendukung penelitian.

